



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2021

"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"

TAHUN ANGGARAN 2020



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.


Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Pangkalpinang, 03 Agustus 2020

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Noviar Ishak
Pembina Utama Madya
NIP. 19601124 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 .	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	12
2.4. Review terhadap rancangan RKPD	12
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 23
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	23
3.2. Tujuan dan sasaran Renja.....	24
3.3. Program dan Kegiatan	24
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 31
BAB V PENUTUP.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Reakapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja	8
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah.....	11
Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	14
Tabel 2.4 Usulan program dan kegiatan	22
Tabel 3.1 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja.....	24
Tabel 3.2 Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah 2021.....	25
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun 2020.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), salah satu bahan yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lain yang menjadi Prioritas Pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 adalah menjabarkan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 yang meliputi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 adalah :

- 1) Menyiapkan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021.
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh PD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 3) Sebagai dasar tolok ukur dalam pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 dirumuskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian **Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”*** dengan Misi **(1)** Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah; **(2)** Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas; **(3)** Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal; **(4)** Meningkatkan kesehatan masyarakat ; **(5)** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; **(6)** Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke 2. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, sebagaimana terdapat di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan (persen)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	85	77,29	80	77,55	97%	82	77,55	94,5%
Program Kebinaamargaan	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap (persen)	92%	83,66%	94,21%	92,23%	98%	91%	N/A	N/A
Program Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	36%	6,50%	7%	7,02%	100%	22%	7,02	32%
	Persentase penyediaan Air Baku	30%	0,00%	10%	0,19%	2%	15,00%	0,19%	1%
	Persentase peningkatan luas daerah yang terlindungi dari daya Rusak Air	8,80%	0,00%	5,70%	6,06%	106%	3.8%	6,06%	69%

Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketaatan terhadap RTRW	100%	40%	40%	80%	200%	70%	80%	80%
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat	100%	20%	40%	40%	100%	60%	40%	40%
Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik	95%	70%	87,50%	75%	86%	91,67%	75%	79%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap (persen)
2. Rasio Jaringan Irigasi
3. Persentase penyediaan Air Baku
4. Persentase peningkatan luas daerah yang terlindungi dari daya Rusak Air
5. Ketaatan terhadap RTRW
6. Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat
7. Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap (persen)	-	-	93,43%	94,21%	95,38%	96,56%	83,66%	92,23%	95,38%	96,56%	-
2	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	6%	7%	22%	29%	6,50%	7,02%	22%	29%	-
3	Persentase penyediaan Air Baku	-	-	0%	10%	15%	25%	0,00%	0,19%	15%	25%	-
4	Persentase peningkatan luas daerah yang terlindungi dari daya Rusak Air	-	-	1.3%	5.7%	3.8%	6.0%	0,00%	6,06%	3.8%	6.0%	-
5	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	20%	40%	70%	90%	80%	80%	70%	90%	-
6	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat	-	-	20%	40%	60%	80%	20%	40%	60%	80%	-
7	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik	-	-	87,50%	87,50%	91,67%	93,75%	70%	75%	91,67%	93,75%	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia terutama secara kualitas dan kuantitas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana di setiap bidang.
3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di bidang infrastruktur.

Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan di bidang kebinamargaan. Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya diklat-diklat teknis maupun fungsional yang diadakan baik pada tingkat pusat dan daerah.
2. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang peningkatan infrastruktur dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan infrastruktur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel.2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp 128.205.277.522	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp 186.000.000.000	
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					Penyelenggaraan Jalan Provinsi					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Provinsi	Panjang Jalan yang terencana	1420 m	Rp 3.933.493.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Provinsi	Panjang Jalan yang terencana	30,31 km	Rp 536.832.500	
	Pembangunan Jalan	Kota Pangkalpinang	Panjang Jalan yang terbangun	1,7 km	Rp 4.238.905.000	Subkegiatan Survey Kondisi Jalan Jembatan	Provinsi	Kondisi Jalan Jembatan dalam Kondisi Mantap	854,498 Km	Rp 1.280.887.000	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Bangka, Babar, Bateng, Basel, Belitung, Beltim	Panjang Jalan yang dilebarkan	13 km	Rp 57.370.750.000	Subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Provinsi	Panjang Jalan yang dilebarkan	10,6 Km	Rp 40.615.845.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pangkalpinang, bangka, babar, bateng, basel	Panjang jalan yang terpelihara	7,5 km	Rp 26.908.005.000	Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Provinsi	Panjang fungsional jalan yang terpelihara	784,65 Km	Rp 25.498.990.500	

	Pemeliharaan Rutin Jalan	Provinsi	Panjang fungsional jalan yang terpelihara	782,45 km	Rp 28.274.344.522	Subkegiatan Penggantian Jembatan	Provinsi	Panjang jembatan yang diganti	23 m	Rp 8.170.260.000	
	Penggantian Jembatan	Beltim	Panjang jembatan yang diganti	10 m	Rp 4.082.595.000	Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Provinsi	Panjang jembatan yang terpelihara	3508,75 m	Rp 3.397.185.000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Provinsi	Panjang jembatan yang terpelihara	3508,75 m	Rp 3.397.185.000	Subkegiatan Rehabilitasi Jalan	Provinsi	Panjang jalan yang direhabilitasi	1,5 km	Rp 12.000.000.000	
						Subkegiatan Pembangunan Jalan (PHNJD)	Provinsi	Panjang Jalan yang terbangun	10 km	Rp 94.500.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				Rp 36.818.000.000					Rp 29.700.000.000	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Provinsi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	4 Dokumen	Rp 2.900.000.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	4 dokumen	Rp 2.100.992.500	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur	Panjang tanggul sungai yang terbangun	3400 m	Rp 6.450.000.000	Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Provinsi	Panjang tanggul sungai yang terbangun (m)	2000 m	Rp 3.742.992.500	

	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Belitung	Panjang Bangunan Pengaman pantai yang terbangun	300 m	Rp 1.500.000.000	Subkegiatan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Provinsi	Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi	84 km	Rp 3.892.040.000	
	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Belitung	Panjang bangunan pengaman pantai yang terehabilitasi	400 m	Rp 1.000.000.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Provinsi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4 Dokumen	Rp 457.230.000	
	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	7 Kab/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung	Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi	(210 Km)	Rp 6.140.000.000	Subkegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp 827.060.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	8 Kab/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung	Panjang tanggul dan tebing sungai yang terpelihara (210 Km)	(210 Km)	Rp 1.058.000.000	Subkegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Provinsi	Luas Bangunan Penampung air	3,5 ha	Rp 12.500.680.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Provinsi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2 Dokumen	Rp 360.000.000	Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Provinsi	Luas bangunan polder/kolam retensi	3,5 ha	Rp 3.831.097.500	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Kab. Belitung dan Belitung Timur	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp 500.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi	Provinsi	1	Lembaga	Rp 70.000.000	

	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bangka & Bangka Tengah	Luas Bangunan Penampung air	4,77 ha	Rp 5.000.000.000						
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kab. Bangka	Luas bangunan polder/kolam retensi	2,65 Ha	Rp 2.500.000.000						
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Bangka Selatan	Luas Daerah Irigasi yang direncanakan	(172 Hektar)	Rp 200.000.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Provinsi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	Rp 1.400.000.000	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Bangka Barat & Bangka	Panjang jaringan irigasi permukaan yang terbangun	2000 m	Rp 5.000.000.000	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Provinsi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	14554 m	Rp 312.300.000	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Bangka Selatan	Panjang irigasi rawa yang terbangun	1200 m	Rp 3.000.000.000	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Provinsi	Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	7000 m	Rp 250.112.500	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Bangka Barat & Bangka	Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	13054 m	Rp 460.000.000	Subkegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	Provinsi	Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 lembaga	Rp 315.495.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Bangka Selatan	Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	7400 m	Rp 250.000.000						
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Provinsi	Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	2 Lembaga	Rp 500.000.000						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Rp 4.500.000.000					Rp 2.160.000.000	

	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Provinsi	Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan & dan jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	1 RTWT/2 RRTR	Rp 750.000.000	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Provinsi	Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	1 RTRW		
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Provinsi	Jumlah kesepakatan perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota	5 Kesepakatan	Rp 200.000.000	Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Provinsi			Rp 850.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Provinsi	Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	1 RRTR	Rp 50.000.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Provinsi	Jumlah insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	5 insentif dan 5 disinsentif	Rp 50.000.000	Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Provinsi	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Sosialisasi	Rp 50.000.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Provinsi	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	35 Pelanggaran	Rp 100.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Provinsi				
	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Provinsi	Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	16 Rekomendasi Teknis kesesuaian rencana tata ruang	Rp 100.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Provinsi	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	21 Pelanggaran	Rp 275.000.000	
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Provinsi	Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	16 Rekomendasi Teknis kesesuaian rencana tata ruang	Rp 355.000.000	

	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Provinsi	Luas lokasi pengadaan tanah	10 Hektar	Rp 100.000.000	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Provinsi				
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					Subkegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Provinsi	Luas lokasi pengadaan tanah	5 Hektar	Rp 30.000.000	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi	Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi	2	Rp 100.000.000	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi				
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					Subkegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Sengketa	Rp 20.000.000	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi	Luas tanah yang dibebaskan	9,8 Hektar	Rp 3.000.000.000	Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi	Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi	2 Sengketa	Rp 30.000.000	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi				
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi	Jumlah titik lokasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Lokasi	Rp 50.000.000	

	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Provinsi	Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	100 Hektar	Rp 100.000.000	Subkegiatan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi	Jumlah luas tanah yang diberikan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	0,5 ha	Rp 120.000.000	
						Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi				
						Subkegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Provinsi	Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	50 Hektar	Rp 50.000.000	
						Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	Provinsi				
						Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penggunaan tanah	1 Dokumen	Rp 280.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Rp 923.637.078					Rp 399.985.000	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi				
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	150 orang	Rp 411.557.078	Subkegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Optimalisasi Mobile Training Unit (MTU)	7 sesi	Rp 289.135.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi	Jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikat	90 orang	Rp 110.250.000	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Provinsi				
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Provinsi	Jumlah asosiasi profesi dan badan usaha jasa konstruksi yang diberdayakan	20 lembaga	Rp 168.895.000	Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Provinsi	Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	1 layanan	Rp 110.850.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi	Jumlah kegiatan pelatihan tenaga ahli konstruksi yang terselenggara	7 kegiatan	Rp 36.850.000						

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi										
	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Provinsi	Jumlah administrator SIPJAKI yang terlatih	24 orang	Rp 140.010.000						
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Provinsi	Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	3 laporan	Rp 56.075.000						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah provinsi khususnya bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah yang bersifat lintas batas kabupaten/kota.

Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasi berdasarkan kewenangan. Untuk lebih jelasnya usulan tabel usulan program masyarakat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Perbaikan drainase dan saluran	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	400 m	POKIR DPRD
2	Pembangunan drainase	Kecamatan Riau Silip, Kab. Bangka, Riau Silip, Riau Silip, Seluruh Kelurahan/Desa	Panjang tanggul sungai yang dibangun	500 m	POKIR DPRD
3	Pembangunan Talud pantai	Desa sungai samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	Panjang Bangunan Pengaman pantai yang terbangun	300 m	POKIR DPRD
4	Penyusunan RZWP3K	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil			POKIR DPRD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui konektivitas dan kemaritiman. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan tersebut meliputi 4 aspek, yaitu;

1. Infrastruktur untuk penyediaan pelayanan dasar difokuskan untuk pembangunan aksesibilitas jaringan jalan mendukung daerah tertinggal dan perbatasan demi tercapainya pemerataan ekonomi, dan Penyediaan infrastruktur air baku untuk mendorong kegiatan ekonomi.
2. Perkuatan jalur logistik utama dan keterpaduan simpul transportasi dengan membangun konektivitas antar wilayah untuk memantapkan perekonomian wilayah.
3. Dukungan infrastruktur untuk sector unggulan pertanian, industry, dan pariwisata dengan mendorong pengembangan kawasan industry, Pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Luar pulau jawa untuk pemerataan pembangunan dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi baik itu pelabuhan, jalan dan Kereta Api, pembangunan infrastruktur untuk mendorong sentra produksi pertanian utama untuk memantapkan ketahanan pangan dengan penyediaan sarana prasarana pertanian seperti jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan waduk.
4. Dukungan infrastruktur perkotaan dengan meningkatkan daya saing dengan cara perkuatan infrastruktur perkotaan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas PUPR

Tujuan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 adalah **“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum”** dan sasaran rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang adalah **“Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur”**

Tujuan, Sasaran dan indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Tujuan, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur		Rasio Ketersediaan Infrastruktur	67%
		Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur	0,68

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 antara lain meliputi 6 program dengan lokasi tersebar di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan total rencana kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)
	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		
	Tolok Ukur	Targ et	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 245.450.00 0.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							Rp 245.450.00 0.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							Rp 26.390.015. 000
	Nilai SAKIP PD	80					Rp 750.000.00 0
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Rp 750.000.00 0
			Jumlah dok perencanaa n dan evaluasi	17 DOKUMEN			Rp 750.000.00 0
Subkegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah							Rp 53.500.000
					Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	3 DOKUME N	Rp 53.500.000
Subkegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan							Rp 50.000.000
					Jumlah RKA/DPA yang tersusun	4 DOKUME N	Rp 50.000.000
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah							Rp 156.200.00 0
					Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4 DOKUME N	Rp 156.200.00 0
Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah							Rp 401.500.00 0
					jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	2 DOKUME N	Rp 401.500.00 0
Subkegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah							Rp 88.800.000
					Jumlah dok	4	Rp

					Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	DOKUMEN	88.800.000
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					Rp 25.640.015.000
Kegiatan Administrasi Keuangan							Rp 19.788.980.000
			Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)	80			Rp 19.788.980.000
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Rp 19.750.000.000
					jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	170 orang	Rp 19.750.000.000
Subkegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran							Rp 24.350.000
					Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	14 Laporan	Rp 24.350.000
Subkegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun							Rp 14.630.000
					jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	Rp 14.630.000
Kegiatan Administrasi umum							Rp 5.697.775.000
			survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80			Rp 5.697.775.000
Subkegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat							Rp 24.300.000
					Jumlah Materai	4800 lembar	Rp 24.300.000
Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							Rp 404.400.000
					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	Rp 404.400.000
Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor							Rp 226.200.000
					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	6 orang	Rp 226.200.000
Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional							Rp

							700.700.000
					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	19 unit	Rp 97.500.000
					Jumlah tenaga sopir	16 orang	Rp 603.200.000
Subkegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan							Rp 262.710.000
					Jumlah pengelola administrasi keuangan	24 orang	Rp 262.710.000
Subkegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor							Rp 244.200.000
					Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	6 orang	Rp 226.200.000
					Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10 jenis	Rp 18.000.000
Subkegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja							Rp 15.000.000
					jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 jenis	Rp 15.000.000
Subkegiatan Penyediaan alat tulis kantor							Rp 40.000.000
					jumlah jenis ATK yang dibeli	20 jenis	Rp 40.000.000
Subkegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan							Rp 69.000.000
					jumlah barang cetak	eksemplar	Rp 34.000.000
					Jumlah penggandaan	1 paket	Rp 35.000.000
Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							Rp 58.000.000
					Jumlah komponen instalasi listrik	10 jenis	Rp 58.000.000
Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							Rp 229.000.000
					jumlah jenis peralatan kantor	10 jenis	Rp 229.000.000
Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							Rp 25.000.000
					jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5000 eksemplar	Rp 25.000.000

Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor							Rp 20.350.000
					jumlah bahan logistik kantor	673 unit	Rp 20.350.000
Subkegiatan Penyediaan makan dan minum							Rp 65.000.000
					Jumlah makan dan minum Tamu	20 pax	Rp 30.000.000
					Jumlah makan dan minum rapat	1400 pax	Rp 35.000.000
Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							Rp 383.455.000
					jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	200 kali	Rp 183.455.000
					Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	36 kali	Rp 200.000.000
Subkegiatan Pengadaan mebeleur							Rp 20.000.000
					Jumlah mebelair	10 unit	Rp 20.000.000
Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							Rp 2.554.000.000
					jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Rp 1.800.000.000
					jumlah operator jembatan	20 orang	Rp 754.000.000
Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional							Rp 149.960.000
					Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	12 unit	Rp 149.960.000
Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor							Rp 61.000.000
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Rp 61.000.000
Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							Rp 22.000.000
					jumlah bbm genset	2000 liter	Rp 22.000.000
Subkegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional							Rp 123.500.000
					jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	10 unit	Rp 123.500.000
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Rp

							153.260.000
			survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	80			Rp 153.260.000
Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan formal							Rp 90.000.000
					jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	50 orang	Rp 90.000.000
Subkegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan							Rp 63.260.000
					jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	50 orang	Rp 63.260.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							Rp 399.985.000
	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	96,09%					Rp 399.985.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi							Rp 289.135.000
			Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 penyelenggaraan			Rp 289.135.000
Subkegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi							Rp 289.135.000
					Jumlah Pelaksanaan Optimalisasi Mobile Training Unit (MTU)	7 sesi	Rp 289.135.000
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi							Rp 110.850.000
			Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1 penyelenggaraan			Rp 110.850.000

Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi							Rp 110.850.000
					Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	1 layanan	Rp 110.850.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR							Rp 29.700.000.000
	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	1%					Rp 9.806.025.000
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							Rp 27.422.092.500
			Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	1%			Rp 27.422.092.500
Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai							Rp 2.100.992.500
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	4 dokumen	Rp 2.100.992.500
pemuktahiran data pengaman pantai bangka belitung					jumlah rencana pemuktahiran data pengaman pantai bangka	1 Dokumen	Rp 91.310.000
penyusunan DED pengaman pantai bangka belitung					jumlah dokumen teknis pengaman pantai pulau bangka belitung	1 Dokumen	Rp 1.617.322.500
Peyusunan Dokumen Lingkungan Kolam Retensi Sungai Muntok					jumlah dokling kolam retensi sungai muntok	1 Dokumen	Rp 92.360.000
Perencanaan					jumlah rencana	1	Rp

Teknik Talud Sungai Lenggang					teknin talud sungai sungai lenggang	Dokumen	300.000.000
Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai							Rp 3.742.992.500
					Panjang tanggul sungai yang terbangun (m)	2000 m	Rp 3.742.992.500
Pembangunan Tanggul sungai/drainase Primer Desa Kurnia Jaya					panjang tanggul desa kurnia jaya yang terbangun	1000 m	Rp 1.446.360.000
Pembangunan Talud Sungai Air Rayak					panjang talud sungai air rayak yang terbangun	500 m	Rp 1.450.272.500
Pembangunan Drainase Kampung Seberang Toboali					panjang drainase kampung seberang toboali yang terbangun	500 m	Rp 846.360.000
Subkegiatan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai							Rp 3.892.040.000
					Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi	84 km	Rp 3.892.040.000
Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Belitung					Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab.belitung	12 km	Rp 562.220.000
Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Belitung Timur					Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se.kab. Beltim	12 km	Rp 562.220.000
Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka					Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab.bangka	12 km	Rp 554.720.000
Pemeliharaan Rutin Sungai se Kota Pangkalpinang					Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kota pangkalpinang	12 km	Rp 539.720.000
Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Selatan					Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Basel	12 km	Rp 559.220.000
Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten					Panjang sungai/kanal banjir yang	12 km	Rp 554.720.000

Bangka Tengah					dinormalisasi se.kab. Bateng		
Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Barat					Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Babar	12 km	Rp 559.220.000
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi							Rp 70.000.000
					1	Lembaga	Rp 70.000.000
	Persentase Penyediaan Air Baku	1,60 %					Rp 17.616.067.500
Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya							Rp 457.230.000
					Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4 Dokumen	Rp 457.230.000
Pemuktahiran sistem informasi air baku bangka belitung					jumlah rencana Pemuktahiran sistem informasi air baku bangka belitung	1 dokumen	Rp 100.810.000
Penyusunan Dokumen Lingkungan Embung Ekaguna Selindung					jumlah dokling embung ekaguna selindung	1 Dokumen	Rp 264.060.000
Penyusunan Dokumen Lingkungan Prasarana Air Baku Bukit Pading					jumlah dokling prasarana air baku bukit pading	1 Dokumen	Rp 92.360.000
Subkegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi							Rp 827.060.000
					Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp 827.060.000
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Pulau Belitung					Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan	1 Dokumen	Rp 827.060.000

					Provinsi		
Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya					Luas Bangunan Penampung air		Rp 3.831.097.500
Pembangunan Penampungan Sumber Air Baku Kolong Kerasak					Luas Bangunan Penampung air	3,5 ha	Rp 3.831.097.500
Subkegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi							Rp 12.500.680.000
					Luas bangunan polder/kolam retensi	3,5 ha	Rp 12.500.680.000
Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok					Luas bangunan polder/kolam retensi	3,5 Ha	Rp 12.500.680.000
	Rasio Irigasi	0,1					Rp 2.277.907.500
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							Rp 2.277.907.500
			Rasio Irigasi	0,1			Rp 2.277.907.500
Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa							Rp 1.400.000.000
					Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	Rp 1.400.000.000
Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi DI. Buleng					jumlah rencana teknis irigasi DI Buleng	1 Dokumen	Rp 400.000.000
Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi DI. Sungai Jeruk					jumlah rencana teknis irigasi DI sungai jeruk	1 Dokumen	Rp 800.000.000
Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi DI. Jeriji					jumlah rencana teknis irigasi DI jeriji	1 Dokumen	Rp 200.000.000
Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							Rp 312.300.000
					Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	14554 m	Rp 312.300.000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DI					Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	1894 m	Rp 50.000.000

Kimak Kab.Bangka							
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DI Buleng (lintas kab. Bangka - Kab. Bangka Barat)					Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	11160 m	Rp 212.300.000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DI Jeriji Kab. Bangka Selatan					Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	1500	Rp 50.000.000
Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa							Rp 250.112.500
					Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	7000 m	Rp 250.112.500
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa DI Serdang Pergam Kab.Bangka Selatan					Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	7000 m	Rp 250.112.500
Subkegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi							Rp 315.495.000
					Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 lembaga	Rp 315.495.000
Operasional Komisi Irigasi					Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 Lembaga	Rp 315.495.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							Rp 186.000.000.000
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,56%					Rp 186.000.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi							Rp 186.000.000.000
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,56%			Rp 186.000.000.000
Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan							Rp 536.832.500
					Panjang Jalan	30,31 km	Rp

					yang terencana		536.832.500
DED Jalan Perawas - Buding					Panjang Jalan perawas-buding yang terencana	30,31 km	Rp 536.832.500
Subkegiatan Survey Kondisi Jalan Jembatan							Rp 1.280.887.000
					Kondisi Jalan Jembatan dalam Kondisi Mantap	854,498 Km	Rp 1.280.887.000
Inspeksi Kondisi Jalan					Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap	850,99 Km	Rp 651.680.000
Inspeksi Kondisi Jembatan					Kondisi Jembatan dalam Kondisi Mantap	3,508 Km	Rp 629.207.000
Pembangunan Jalan							Rp 94.500.000.000
					Panjang Jalan yang terbangun		Rp 94.500.000.000
Pembangunan jalan PHNJD					panjang jalan phnjd yang terbangun	10 km	Rp 94.500.000.000
Subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar							Rp 40.615.845.000
					Panjang Jalan yang dilebarkan	10,6 Km	Rp 40.615.845.000
Pelebaran Jalan Sp. Renggang - Gantung					Panjang Jalan sp.renggang gantung yang dilebarkan	2 Km	Rp 9.200.000.000
Pelebaran Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin					Panjang Jalan puding besar saing kota waringin yang dilebarkan	2 Km	Rp 9.307.922.500
Pelebaran Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru					Panjang Jalan parit tiga tanjung ruyang dilebarkan	3,6 Km	Rp 12.800.000.000
Pelebaran Jalan Sp. Gedong - Payung					Panjang Jalan sp. Gedong payung yang dilebarkan	3 Km	Rp 9.307.922.500
Rehabilitasi jalan							Rp 12.000.000.000
					Panjang jalan yang direhabilitasi	1,5 km	Rp 12.000.000.000
rehabilitasi jalan sungailiat-puding besar					Panjang jalan sungailiat-puding besar yang direhabilitasi	1,5 km	Rp 12.000.000.000

Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan							Rp 25.498.990. 500
					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	784,65 Km	Rp 25.498.990. 500
Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang-Batas Kota (Sp. Katis); A. Yani; Sp. Semabung-Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Sp. Pasir Padi - Alexander; PPI; Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur; Sp. Pulau Bangka - Sampur					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	29,28 km	Rp 950.645.00 0
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kompleks Perkantoran Perkantoran Prov. Kep. Babel					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	15,71 km	Rp 1.105.500.0 00
Pemeliharaan Rutin Jalan Sungailiat - Puding Besar					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	27,27 km	Rp 899.275.00 0
Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tg. Pesona - Jeliti - Sp. Perahu					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	36,03 km	Rp 1.157.290.0 00
Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	23,1 km	Rp 778.345.00 0
Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	35,94 km	Rp 1.154.680.0 00
Pemeliharaan Rutin jalan Ibul - Parit Tiga					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	26,38 km	Rp 886.385.00 0
Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	27,06 km	Rp 906.105.00 0
Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	16,65 km	Rp 599.415.00 0
Pemeliharaan Rutin Jalan Sungai Dua - Dam III - Sangku; Sangku - Simpang Tempilang					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	30,09 km	Rp 997.950.00 0
Pemeliharaan					Panjang	15,97 km	Rp

Rutin Jalan Pangkalpinang - Sp. Katis					fungsional jalan yang terpelihara		574.995.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Katis - Sungai Selan					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	12,88 km	Rp 534.010.500
Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Sp. Katis					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	16,63 km	Rp 589.335.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Puput - Sp. Gedong; Sungai Selan - Lampur - Sp. Gedong					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	17,03 km	Rp 605.735.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Penagan - Tanjung Tedung					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	16,55 km	Rp 587.015.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	24,4 km	Rp 819.465.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tg. Berikat					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	24,24 km	Rp 814.825.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Gedong - Payung					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	33,5 km	Rp 1.092.865.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Payung - Air Bara					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	29 km	Rp 962.365.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Payung - Bedengung; Bedengung - Batu Betumpang					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	32,65 km	Rp 1.072.190.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas - Bedengung					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	23,2 km	Rp 794.165.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandan; Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	30,45 km	Rp 959.575.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat (Sijuk) - Buding					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	25,85 km	Rp 839.475.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - Buding					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	26,41 km	Rp 855.715.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Badau - Dendang; Bantan -					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	45,39 km	Rp 1.337.822.500

Pelulusan							
Pemeliharaan Rutin Jalan Dendang - Gantung					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	34,26 km	Rp 1.087.340.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Renggang - Gantung; Gantung - Simpang Padang					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	32,88 km	Rp 1.043.345.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Buding - Manggar					Panjang fungsional jalan yang terpelihara	43,85 km	Rp 1.293.162.500
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Kebinarmargaan					Peralatan lab yang terpelihara	1 paket	Rp 200.000.000
Subkegiatan Penggantian Jembatan							Rp 8.170.260.000
					Panjang jembatan yang diganti	23 m	Rp 8.170.260.000
Penggantian Jembatan Air Limau II					panjang jembatan air limau yang diganti	13 m	Rp 4.560.555.000
Penggantian Jembatan Air Delas					panjang jembatan air delas yang diganti	15 meter	Rp 3.609.705.000
Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan							Rp 3.397.185.000
					Panjang jembatan yang terpelihara	3508,75 m	Rp 3.397.185.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Bangka					Panjang jembatan di pulau bangka yang terpelihara	1523,35 m	Rp 894.400.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Belitung					Panjang jembatan di pulau belitung yang terpelihara	1200,9 m	Rp 713.975.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan baturusa II					Panjang jembatan baturusa II yang terpelihara	784,5 m	Rp 1.788.810.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD PUPR)							Rp 800.000.000,00
	survey kepuasan pelayanan umum	80					Rp 800.000.000,00
Kegiatan Administrasi umum							Rp

							800.000.00 0,00
			survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80			Rp 800.000.00 0,00
Subkegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat							Rp 25.000.000, 00
					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Rp 15.000.000, 00
					Jumlah Materai	1500 Lbr	Rp 10.000.000, 00
Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							Rp 134.000.00 0,00
					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bln	Rp 134.000.00 0,00
Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor							Rp 150.800.00 0,00
					Jumlah tenaga keamanan/satpa m kantor yang dipekerjakan	4 orang	Rp 150.800.00 0,00
Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional							Rp 57.700.000, 00
					Jumlah tenaga sopir	1 Orang	Rp 37.700.000, 00
					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	5 unit	Rp 20.000.000, 00
Subkegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan							Rp 32.775.000, 00
					Jumlah pengelola administrasi keuangan	5 Orang	Rp 32.775.000, 00
Subkegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor							Rp 198.500.00 0,00
					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Jenis	Rp 10.000.000, 00
					Jumlah tenaga kebersihan yang	5 Orang	Rp 188.500.00

					dipekerjakan		0,00
Subkegiatan Penyediaan alat tulis kantor							Rp 20.000.000,00
					jumlah jenis ATK yang dibeli	jenis	Rp 20.000.000,00
Subkegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan							Rp 7.500.000,00
					Jumlah penggandaan	10000 Lbr	Rp 3.500.000,00
					jumlah barang cetak	40 eksemplar	Rp 4.000.000,00
Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							Rp 16.000.000,00
					jumlah peralatan kantor	1 Paket	Rp 16.000.000,00
Subkegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga							Rp 5.000.000,00
					Jumlah peralatan rumah tangga	unit	Rp 5.000.000,00
Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							Rp 3.000.000,00
					Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600 eksemplar	Rp 3.000.000,00
Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor							Rp 34.725.000,00
					jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	unit	Rp 34.725.000,00
Subkegiatan Penyediaan makan dan minum							Rp 45.000.000,00
					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	pax	Rp 25.000.000,00
					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	pax	Rp 20.000.000,00
Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							Rp 70.000.000,00
					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	Rp 20.000.000,00
					Jumlah koordinasi dan	kali	Rp 50.000.000,00

					konsultasi dalam daerah		00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							Rp 2.160.000.000
	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	83%					Rp 2.160.000.000
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi							Rp 950.000.000
			Jumlah perencanaan tata ruang yang ditetapkan	2 perencanaan tata ruang			Rp 250.000.000
Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi							Rp 850.000.000
					Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	1 RTRW	Rp 850.000.000
Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi							Rp 50.000.000
					Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	1 RRTR	Rp 50.000.000
Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang							Rp 50.000.000
					Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	1 Sosialisasi	Rp 50.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi							Rp 630.000.000
			Terselenggaraanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15 pertemuan			Rp 630.000.000
Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang							Rp 275.000.000

					Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	21 Pelanggaran	Rp 275.000.000
Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang							Rp 355.000.000
					Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	16 Rekomendasi Teknis kesesuaian rencana tata ruang	Rp 355.000.000
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							
Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi							Rp 30.000.000
			Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi yang ditetapkan	1 Lokasi			Rp 30.000.000
Subkegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum							Rp 30.000.000
					Luas lokasi pengadaan tanah	5 Hektar	Rp 30.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							Rp 50.000.000
			Jumlah Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terselesaikan	1 penyelesaian sengketa			Rp 50.000.000

Subkegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							Rp 20.000.000
					Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Sengketa	Rp 20.000.000
Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							Rp 30.000.000
					Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi	2 Sengketa	Rp 30.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							Rp 170.000.000
			Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah			Rp 170.000.000
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							Rp 50.000.000
					Jumlah titik lokasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Lokasi	Rp 50.000.000
Subkegiatan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							Rp 120.000.000
					Jumlah luas tanah yang diberikan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	0,5 ha	Rp 120.000.000

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							Rp 50.000.000
			Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 lokasi			Rp 50.000.000
Subkegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah							Rp 50.000.000
					Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	50 Hektar	Rp 50.000.000
PROGRAM PENATAAGUNAA N TANAH							
Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi							Rp 280.000.000
			Jumlah Perencanaa n Penggunaan Tanah yang hamparanny a lintas daerah kabupaten/k ota dalam 1 daerah Provinsi	1 dokumen perencanaan n penggunaa n tanah			Rp 280.000.000
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah							Rp 280.000.000
					Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penggunaan tanah	1 Dokume n	Rp 280.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Dinas PUPR tahun lalu dan hasil evaluasi renja Dinas PUPR tahun berjalan maka Rencana Kerja Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021 mengusulkan anggaran Belanja Langsung dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp 245.450.000.000 yang terdiri dari 10 program, 17 kegiatan dan 79 sub kegiatan.

Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih 2017-2022. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
						Hasil Progra m	Keluar an Kegiat an	Hasil Kegiatan	Lok asi Sub Keg iat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)		Su mb er Da na	Target Capaian Kinerja				
										Pro gra m	Keluar an Kegiat an	Hasil Kegiat an				Pro gra m	Keluar an Kegiat an	Hasil Kegiat an	Pagu Indikat if (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	Rp 10	11	12	13	14	15		
1					URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp 245.45 0.000.0 00					Rp 269.99 5.000. 000		
1 3					URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								Rp 245.45 0.000.0 00					Rp 269.99 5.000. 000		
1 3 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								Rp 26.390. 015.00 0					Rp 29.029 .016.5 00		
						Nilai SAKIP PD				80			Rp 750.00 0.000			80		Rp 825.00 0.000		
1 3 1 1.01					Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Rp 750.00 0.000					Rp 825.00 0.000		
							Jumlah dok perenc anaan dan evaluas i				17 DOKU MEN		Rp 750.00 0.000				17 DOKU MEN	Rp 825.00 0.000		
1 3 1 1.01 1					Subkegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah								Rp 53.500. 000					Rp 58.850. .000		
							Jumlah dok perencan aan Renstra/R enja PD	Pro vins i				3 DOK UME N	Rp 53.500. 000	AP BD				3 DOK UME N	Rp 58.850 .000	
1 3 1 1.01 2					Subkegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan								Rp 50.000. 000					Rp 55.000 .000		
							Jumlah RKA/DPA yang tersusun	Pro vins i				4 DOK UME N	Rp 50.000. 000	AP BD				4 DOK UME N	Rp 55.000 .000	
1 3 1 1.01 3					Subkegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah								Rp 156.20 0.000					Rp 171.82 0.000		
							Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	Pro vins i					4 DOK UME N	Rp 156.20 0.000	AP BD				4 DOK UME N	Rp 171.82 0.000
1 3 1 1.01 4					Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah								Rp 401.50 0.000						Rp 441.65 0.000	
							jumlah kesepakat an Koordinas i dan sinkronisa si perencan aan PD	Pro vins i					2 DOK UME N	Rp 401.50 0.000	AP BD				2 DOK UME N	Rp 441.65 0.000
1 3 1 1.01 5					Subkegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah								Rp 88.800. 000						Rp 97.680 .000	
							Jumlah	Pro				4	Rp	AP				4	Rp	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

									Jumlah makan dan minum rapat	Pro vinsi				1400 pax	Rp 35.000.000	AP BD					1400 pax	Rp 38.500.000
1	3	1	1.03	18		Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah									Rp 383.455.000							Rp 421.800.500
									jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pro vinsi				200 kali	Rp 183.455.000	AP BD					200 kali	Rp 201.800.500
1	3	1	1.03	19											Rp -							
									Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	Pro vinsi				36 kali	Rp 200.000.000	AP BD					36 kali	Rp 220.000.000
1	3	1	1.03	26		Subkegiatan Pengadaan mebeleur									Rp 20.000.000							Rp 22.000.000
									Jumlah mebelair	Pro vinsi				10 unit	Rp 20.000.000	AP BD					10 unit	Rp 22.000.000
1	3	1	1.03	29		Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									Rp 2.554.000.000							Rp 2.809.400.000
									jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pro vinsi				1 unit	Rp 1.800.000.000	AP BD					1 unit	Rp 1.980.000.000
									jumlah operator jembatan	Pro vinsi				20 orang	Rp 754.000.000	AP BD					20 orang	Rp 829.400.000
1	3	1	1.03	31		Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional									Rp 149.960.000							Rp 164.956.000
									Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	Pro vinsi				12 unit	Rp 149.960.000	AP BD					12 unit	Rp 164.956.000
1	3	1	1.03	33		Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									Rp 61.000.000							Rp 67.100.000
									Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pro vinsi				1 paket	Rp 61.000.000	AP BD					1 paket	Rp 67.100.000
1	3	1	1.03	35		Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									Rp 22.000.000							Rp 24.200.000
									jumlah bbm genset	Pro vinsi				2000 liter	Rp 22.000.000	AP BD					2000 liter	Rp 24.200.000
1	3	1	1.03	41		Subkegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional									Rp 123.500.000							Rp 135.850.000
									jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	Pro vinsi				10 unit	Rp 123.500.000	AP BD					10 unit	Rp 135.850.000
1	3	1	1.04			Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									Rp 153.260.000							Rp 168.586.000
								survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)					80		Rp 153.260.000					80		Rp 168.586.000
1	3	1	1.04	9		Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan formal									Rp 90.000.000							Rp 99.000.000
									jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan	Pro vinsi				50 orang	Rp 90.000.000	AP BD					50 orang	Rp 99.000.000

1	3	1	1.04	1	Subkegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		formal					Rp 63.260.000					Rp 69.586.000
							jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundangan g-undangan	Pro vinsi		50 orang		Rp 63.260.000	AP BD		50 orang		Rp 69.586.000
1	3	1	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							Rp 399.985.000					Rp 439.983.500
						Rasio keterse diaan penyel enggar aan jasa konstr uksi			0,9609			Rp 399.985.000		0,9609			Rp 439.983.500
1	3	1	1	1.01	Kegiatan Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi							Rp 289.135.000					Rp 318.048.500
						Jumlah penyel enggar aan pelatih an tenaga ahli konstr uksi				1 penyel enggar aan		Rp 289.135.000			1 penyel enggar aan		Rp 318.048.500
1	3	1	1	1.01	Subkegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi							Rp 289.135.000					Rp 318.048.500
						Jumlah Pelaksana an Optimalis asi Mobile Training Unit (MTU)		Pro vinsi		7 sesi		Rp 289.135.000	AP BD		7 sesi		Rp 318.048.500
1	3	1	1	1.02	Kegiatan Penyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi							Rp 110.850.000					Rp 121.935.000
						Jumlah Penyel enggar aan Sistem Inform asi Jasa Konstr uksi (SIPJAK I) Cakupa n Daerah Provins i				1 penyel enggar aan		Rp 110.850.000			1 penyel enggar aan		Rp 121.935.000
1	3	1	1	1.02	Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi							Rp 110.850.000					Rp 121.935.000
						Jumlah data dan informasi Jasa Konstruks i yang tersedia		Pro vinsi		1 layan an		Rp 110.850.000	AP BD		1 layan an		Rp 121.935.000
																	Rp -
1	3	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR							Rp 29.700.000.000					Rp 32.670.000.000
						Persen tase pening katan luas kawasa n yang terlind ungi dari daya rusak air			0,01			Rp 9.806.025.000		0,01			Rp 10.786.627.500

1	3	2	1.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								Rp 27.422.092.500					Rp 30.164.301.750
						Persentase peningkatan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air				0,01		Rp 27.422.092.500			0,01		Rp 30.164.301.750
1	3	2	1.01	3	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai							Rp 2.100.992.500					Rp 2.311.091.750
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Provinsi				4 dokumen	Rp 2.100.992.500	AP BD			4 dokumen	Rp 2.311.091.750
					pemukhtahiran data pengaman pantai bangka belitung		Provinsi				1 Dokumen	Rp 91.310.000	AP BD			1 Dokumen	Rp 100.441.000
					penyusunan OED pengaman pantai bangka belitung		Provinsi				1 Dokumen	Rp 1.617.322.500	AP BD			1 Dokumen	Rp 1.779.054.750
					Peyusunan Dokumen Lingkungan Kolam Retensi Sungai Muntok		Provinsi				1 Dokumen	Rp 92.360.000	AP BD			1 Dokumen	Rp 101.596.000
					Perencanaan Teknik Talud Sungai Lenggang		Provinsi				1 Dokumen	Rp 300.000.000	AP BD			1 Dokumen	Rp 330.000.000
																	Rp -
1	3	2	1.01	9	Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai							Rp 3.742.992.500					Rp 4.117.291.750
						Panjang tanggul sungai yang terbangun (m)	Provinsi				2000 m	Rp 3.742.992.500	AP BD			2000 m	Rp 4.117.291.750
					Pembangunan Tanggul sungai/drainase Primer Desa Kurnia Jaya		Provinsi				1000 m	Rp 1.446.360.000	AP BD			1000 m	Rp 1.590.996.000
					Pembangunan Talud Sungai Air Rayak		Provinsi				500 m	Rp 1.450.272.500	AP BD			500 m	Rp 1.595.299.750
					Pembangunan Drainase		Provinsi				500 m	Rp 846.36	AP BD			500 m	Rp 930.99

						Kampung Seberang Toboali				kampung seberang toboali yang terbangu n	i				0.000						6.000
																					Rp -
1	3	2	1.01	46		Subkegiatan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai									Rp 3.892.040.000						Rp 4.281.244.000
										Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi	Pro vinsi				84 km	Rp 3.892.040.000	AP BD			84 km	Rp 4.281.244.000
						Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Belitung				Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab.belitu ng	Pro vinsi				12 km	Rp 562.220.000	AP BD			12 km	Rp 618.442.000
						Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Belitung Timur				Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se.kab. Belitm	Pro vinsi				12 km	Rp 562.220.000	AP BD			12 km	Rp 618.442.000
						Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka				Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab.bangk a	Pro vinsi				12 km	Rp 554.720.000	AP BD			12 km	Rp 610.192.000
						Pemeliharaan Rutin Sungai se Kota Pangkalpinang				Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kota pangkalpi nang	Pro vinsi				12 km	Rp 539.720.000	AP BD			12 km	Rp 593.692.000
						Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Selatan				Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Basel	Pro vinsi				12 km	Rp 559.220.000	AP BD			12 km	Rp 615.142.000
						Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Tengah				Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se.kab. Bateng	Pro vinsi				12 km	Rp 554.720.000	AP BD			12 km	Rp 610.192.000
						Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Barat				Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Babar	Pro vinsi				12 km	Rp 559.220.000	AP BD			12 km	Rp 615.142.000
1	3	2	1.01	68		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi									Rp 70.000.000						Rp 77.000.000
										1					Lemb aga	Rp 70.000.000				Lemb aga	Rp 77.000.000
																					Rp -
1	3	2	1.01			Persen tase Penyed ian Air Baku						0,016			Rp 17.616.067.500				0,016		Rp 19.377.674.250
1	3	2	1.01	1		Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya									Rp 457.230.000						Rp 502.953.000
										Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkung					4 Doku men	Rp 457.230.000				4 Doku men	Rp 502.953.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			1					terpelihar	i				000.00					.000.00
								Panjang	Pro			1,5	Rp				1,5	Rp
								jalan yang	vins			km	12.000.	AP			km	13.200.
								direhabilit	i				000.00	BD				.000.00
								asi										
								Panjang	Pro			1,5	Rp				1,5	Rp
								jalan sungailiat	vins			km	12.000.	AP			km	13.200.
								-puding	i				000.00	BD				.000.00
								besar yang										
								direhabilit										
								asi										
1	3	1	1	1	1			Subkegiatan					Rp					Rp
								Pemeliharaan					25.498.	AP				28.048.
								Rutin Jalan					990.50	BD				.889.50
								Panjang	Pro			784,6	Rp25.4	AP			784,6	Rp
								fungsi	vins			5 Km	98.990.	BD			5 Km	28.048.
								l jalan	i				500					.889.50
								yang terpelihar										
								a										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Pangkalpinang-										
								Batas Kota (Sp.										
								Katis); A. Yani;										
								Sp. Semabung-										
								Sampur; Trem;										
								RE.										
								Martadinata;										
								Sumberejo; Sp.										
								Pasir Padi -										
								Alexander; PPI;										
								Sp. Alexander -										
								Sp. Lingkar										
								Timur; Sp.										
								Pulau Bangka -										
								Sampur										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Dalam										
								Kompleks										
								Perkantoran										
								Perkantoran										
								Prov. Kep.										
								Babel										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Dalam										
								Kompleks										
								Perkantoran										
								Perkantoran										
								Prov. Kep.										
								Babel										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Sungailiat -										
								Puding Besar										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Lingkar Timur;										
								Rebo - Tg.										
								Pesona - Jeliti -										
								Sp. Perahu										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Puding Besar -										
								Saing - Kota										
								Waringin										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Pasir Garam -										
								Penagan - Kota										
								Kapur										
								Pemeliharaan										
								Rutin jalan Ibul										
								- Parit Tiga										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Parit Tiga -										
								Tanjung Ru										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Kelapa - Kayu										
								Arang										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Sungai Dua -										
								Dam III -										
								Sangku; Sangku										
								- Simpang										
								Templang										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Pangkalpinang -										
								Sp. Katis										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan Sp.										
								Katis - Sungai										
								Selan										
								Pemeliharaan										
								Rutin Jalan										
								Namang -										

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

						Jembatan Air Limau II			jembatan air limau yang diganti	vins i				4.560.55.000	BD				5.016.610.500
						Penggantian Jembatan Air Delas			panjang jembatan air delas yang diganti	Pro vins i			15 meter	Rp 3.609.705.000	AP BD			15 meter	Rp 3.970.675.500
1	3	10	101	19		Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan								Rp 3.397.185.000					Rp 3.736.903.500
									Panjang jembatan yang terpelihara	Pro vins i			3508,75 m	Rp 3.397.185.000	AP BD			3508,75 m	Rp 3.736.903.500
						Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Bangka			Panjang jembatan di pulau bangka yang terpelihara	Pro vins i			1523,35 m	Rp 894.400.000	AP BD			1523,35 m	Rp 983.840.000
						Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Belitung			Panjang jembatan di pulau belitung yang terpelihara	Pro vins i			1200,9 m	Rp 713.975.000	AP BD			1200,9 m	Rp 785.372.500
						Rehabilitasi/ Pemeliharaan Operasional Jembatan baturusa II			Panjang jembatan baturusa II yang terpelihara	Pro vins i			784,5 m	Rp 1.788.810.000	AP BD			784,5 m	Rp 1.967.691.000
																			Rp -
1	3	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD PUPR)								Rp 800.000.000					Rp 880.000.000
							survey kepuasan pelayanan umum				80			Rp 800.000.000			80		Rp 880.000.000
1	3	1	103			Kegiatan Administrasi umum								Rp 800.000.000					Rp 880.000.000
							survey kepuasan pelayanan umum (angka)				80			Rp 800.000.000			80		Rp 880.000.000
1	3	1	103	1		Subkegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat								Rp 25.000.000					Rp 27.500.000
									Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Pro vins i			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Rp 15.000.000	AP BD			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Rp 16.500.000
									Jumlah Material	Pro vins i			1500 Lbr	Rp 10.000.000	AP BD			1500 Lbr	Rp 11.000.000
1	3	1	103	2		Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								Rp 134.000.000					Rp 147.400.000
									Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	Pro vins i			12 Bln	Rp 134.000.000	AP BD			12 Bln	Rp 147.400.000
1	3	1	103	3		Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor								Rp 150.800.000					Rp 165.880.000
									Jumlah tenaga keamanatan/satpam kantor yang dipekerjakan	Pro vins i			4 orang	Rp 150.800.000	AP BD			4 orang	Rp 165.880.000
1	3	1	103	6		Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan								Rp 57.700.000					Rp 63.470.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

								minum Tamu yang tersedia											
1	3	1	1.03	18	Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah									Rp 70.000. 000				Rp 77.000 .000	
								jumlah koordinas i dan konsultasi keluar daerah	Pro vins i				kali	Rp 20.000. 000	AP BD			Rp 22.000 .000	
								Jumlah koordinas i dan konsultasi dalam daerah	Pro vins i				kali	Rp 50.000. 000	AP BD			Rp 55.000 .000	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG									Rp 2.160.0 00.000				Rp 2.376. 000.00 0	
						Persen tase kesesu alan penge mbang an infrastr uktur wilaya h dengan rencana a tata ruang				0,8 3				Rp 2.160.0 00.000			0,8 3	Rp 2.376. 000.00 0	
1	3	12	1.01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi									Rp 950.00 0.000				Rp 1.045. 000.00 0	
							Jumlah perenc anaan tata ruang yang ditetap kan				2 perenc anaan tata ruang			Rp 250.00 0.000			2 perenc anaan tata ruang	Rp 275.00 0.000	
1	3	12	1.01	01	Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi									Rp 850.00 0.000				Rp 935.00 0.000	
							Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapka n		Pro vins i				1 RTR W	Rp 850.00 0.000	AP BD			1 RTR W	Rp 935.00 0.000
1	3	12	1.01	02	Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi									Rp 50.000. 000				Rp 55.000 .000	
							Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapka n		Pro vins i				1 RRTR	Rp 50.000. 000	AP BD			1 RRTR	Rp 55.000 .000
1	3	12	1.01	04	Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangunda ngan Bidang Penataan ruang									Rp 50.000. 000				Rp 55.000 .000	
							Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundan gundanga n Bidang Penataan ruang		Pro vins i				1 Sosial isasi	Rp 50.000. 000	AP BD			1 Sosial isasi	Rp 55.000 .000
1	3	12	1.04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi									Rp 630.00 0.000				Rp 693.00 0.000	
						Tersele nggara					15 pertem			Rp 630.00			15 pertem	Rp 693.00	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

					Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
								Jumlah luas tanah yang diberikan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	Pro vins i			0,5 ha	Rp 120.000.000	AP BD			0,5 ha	Rp 132.000.000	
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE													Rp -	
2	10	6	101		Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								Rp 50.000.000					Rp 55.000.000	
							Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan			1 lokasi			Rp 50.000.000				1 lokasi	Rp 55.000.000	
2	10	6	101	01	Subkegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah								Rp 50.000.000					Rp 55.000.000	
							Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	Pro vins i			50 Hektar	Rp 50.000.000	AP BD				50 Hektar	Rp 55.000.000	
2	10	10			PROGRAM PENATAAGUNAN TANAH													Rp -	
2	10	10	101		Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi								Rp 280.000.000					Rp 308.000.000	
							Jumlah Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi			1 dokumen perencanaan penggunaan tanah			Rp 280.000.000				1 dokumen perencanaan penggunaan tanah	Rp 308.000.000	
2	10	10	101	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								Rp 280.000.000					Rp 308.000.000	
							Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan	Pro vins i			1 Dokumen	Rp 280.000.000	AP BD				1 Dokumen	Rp 308.000.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.